



## Persepsi Mahasiswa Terhadap Trust Issue Publik Mengenai Isu DPR RI (Studi Kasus : Jurusan Ilmu Administrasi Negara)

Yunithalia Ananditha <sup>1)</sup>; Radid Alfazry <sup>2)</sup>; Bhayu Rhama <sup>3)</sup>; Yonatan Ari Santoso <sup>4)</sup>; Suprayitno <sup>5)</sup>  
<sup>12345</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya  
Email: <sup>1)</sup> [anandithayunithalia@gmail.com](mailto:anandithayunithalia@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [radidalfazry2993@gmail.com](mailto:radidalfazry2993@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [bhayu\\_rhama@yahoo.com](mailto:bhayu_rhama@yahoo.com)  
<sup>4)</sup> [yonatan.arisantoso@fisip.upr.ac.id](mailto:yonatan.arisantoso@fisip.upr.ac.id) ; <sup>5)</sup> [suprayitno@fisip.upr.ac.id](mailto:suprayitno@fisip.upr.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [26 Mei 2025]

Revised [12 Desember 2025]

Accepted [20 Desember 2025]

### KEYWORDS

Student Perceptions, Public Trust, Indonesian House Of Representatives, Integrity, Political Attitudes.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis persepsi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya terhadap isu kepercayaan publik pada DPR RI. Latar belakangnya adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang konsisten muncul dalam berbagai survei nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif deskriptif melalui survei terhadap 108 mahasiswa angkatan 2023 yang dipilih dengan simple purposive sampling. Instrumen penelitian mengukur persepsi mahasiswa berdasarkan dimensi kognitif, afektif, dan konatif, serta tingkat kepercayaan pada aspek kemampuan, integritas, dan kebajikan. Hasil menunjukkan mahasiswa memiliki pemahaman kognitif yang cukup baik mengenai fungsi DPR RI (2,85), sementara dimensi afektif sangat rendah (1,68) yang mencerminkan kekecewaan terhadap perilaku anggota DPR. Dimensi konatif menjadi yang tertinggi (3,13), mengindikasikan semangat partisipatif untuk tetap mengawasi lembaga legislatif. Pada aspek kepercayaan, kemampuan dinilai cukup (2,59), sedangkan integritas (2,45) dan kebajikan (2,37) berada pada kategori rendah. Temuan ini menunjukkan krisis kepercayaan terhadap DPR RI juga dirasakan mahasiswa FISIP sebagai kelompok intelektual muda. Persepsi negatif terutama dipengaruhi penilaian terhadap moralitas dan keberpihakan DPR, bukan soal kemampuan teknis. Penelitian menekankan perlunya langkah pemulihan melalui transparansi, penguatan etika, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

### ABSTRACT

This study analyses the perceptions of Public Administration students at the University of Palangka Raya regarding public trust in the Indonesian House of Representatives. The background to this study is the consistently low level of public trust that has been revealed in various national surveys. A descriptive quantitative approach was used through a survey of 108 students from the 2023 cohort, who were selected using simple purposive sampling. The research instrument measured students' perceptions based on cognitive, affective, and conative dimensions, as well as the level of trust in terms of competence, integrity, and virtue. The results show that students have a fairly good cognitive understanding of the functions of the DPR RI (2.85), while the affective dimension is very low (1.68), reflecting disappointment with the political behaviour of DPR members. The conative dimension was the highest (3.13), indicating a participatory spirit to continue monitoring the legislative body. In terms of trust, competence was rated as adequate (2.59), while integrity (2.45) and virtue (2.37) were in the low category. These findings show that the crisis of trust in the DPR RI is also felt by FISIP students as a group of young intellectuals. Negative perceptions are mainly influenced by assessments of the morality and partiality of the DPR, not technical capabilities. The study emphasises the need for recovery measures through transparency, strengthening ethics, and commitment to the public interest.

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPR RI menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang menjadi pilar dalam sistem demokrasi perwakilan. Idealnya, lembaga ini menjadi perwujudan aspirasi rakyat serta penyeimbang kekuasaan eksekutif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap DPR RI menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan politik, tetapi juga mencerminkan melemahnya legitimasi lembaga perwakilan rakyat di mata masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa hanya sekitar 69% masyarakat menyatakan percaya kepada DPR RI, menempatkannya di peringkat ke-10 dari 11 lembaga negara. Temuan ini sejalan dengan survei Populi Center (2023) yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI sebesar 63,3%, lebih rendah dibandingkan lembaga seperti Presiden, TNI, dan KPK. Data ini memperlihatkan bahwa DPR RI mengalami krisis kepercayaan yang terus berulang.

Kondisi ini menunjukkan adanya jarak sosial dan psikologis antara masyarakat dengan wakilnya di parlemen, yang apabila dibiarkan dapat mengancam kualitas demokrasi Indonesia.

Krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI umumnya dipicu oleh persepsi negatif masyarakat mengenai kinerja lembaga tersebut. Isu korupsi, pelanggaran etik, politisasi kebijakan, serta kurangnya transparansi menjadi faktor utama yang membentuk persepsi publik bahwa DPR RI tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Dalam konteks perilaku politik, persepsi memiliki peran penting karena memengaruhi cara individu menilai dan merespons suatu objek sosial. Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberikan makna terhadap lingkungan (Organizational Behavior, n.d.). Dengan demikian, persepsi publik terhadap lembaga politik seperti DPR RI tidak hanya dipengaruhi oleh fakta objektif, tetapi juga oleh pengalaman, nilai, serta ekspektasi masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Mahasiswa, khususnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), memiliki peran strategis dalam memahami dan menilai fenomena tersebut. Sebagai kelompok intelektual yang mempelajari teori-teori sosial, politik, dan administrasi publik, mahasiswa FISIP memiliki kemampuan analitis untuk menafsirkan dinamika hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Mereka dilatih untuk berpikir kritis, rasional, dan objektif terhadap isu kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa FISIP terhadap DPR RI tidak sekadar mencerminkan opini pribadi, melainkan juga cerminan dari pemahaman ilmiah atas konsep kepercayaan publik dan legitimasi politik. Keterlibatan FISIP dalam penelitian ini memiliki dasar akademik yang kuat. Sebagai disiplin yang mengkaji perilaku sosial dan politik, FISIP berperan dalam membangun kesadaran kritis terhadap lembaga demokrasi. Menurut teori persepsi sosial, individu dalam hal ini mahasiswa membentuk pandangannya terhadap objek sosial seperti DPR RI berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan akademiknya (Organizational Behavior, n.d.). Di sisi lain, teori kepercayaan menjelaskan bahwa kepercayaan terbentuk dari penilaian terhadap kemampuan (*ability*), integritas (*integrity*), dan kebajikan (*benevolence*) suatu pihak. Hubungan antara teori persepsi dan teori kepercayaan ini penting untuk memahami bagaimana mahasiswa FISIP membangun pandangan mereka terhadap DPR RI apakah lembaga ini masih layak dipercaya atau tidak (Mayer et al., 1995).

Selain itu, penelitian ini penting karena mahasiswa FISIP mewakili generasi muda yang akan menjadi aktor birokrasi, politisi, maupun analis kebijakan di masa depan. Persepsi mereka terhadap DPR RI menjadi indikator awal mengenai sejauh mana kepercayaan generasi terdidik terhadap sistem perwakilan rakyat. Bila mahasiswa FISIP saja memiliki tingkat kepercayaan rendah, hal ini bisa menjadi sinyal serius tentang menurunnya legitimasi politik di kalangan intelektual muda. Sebaliknya, bila persepsi mereka konstruktif dan kritis, hal ini menunjukkan potensi perbaikan budaya politik di masa mendatang. Meskipun banyak survei telah menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, penelitian empiris yang menelaah persepsi mahasiswa FISIP terhadap isu *trust issue* ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya memandang isu kepercayaan publik terhadap DPR RI. Dengan melihat kondisi menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, penelitian ini dirancang untuk menjawab bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kinerja dan integritas DPR RI, serta sejauh mana persepsi tersebut berimplikasi pada tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga legislatif.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosial dan politik, khususnya dalam memahami hubungan antara persepsi publik, kepercayaan, dan legitimasi lembaga negara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DPR RI untuk memperbaiki citra dan kinerjanya melalui peningkatan transparansi, integritas, serta keterlibatan publik dalam proses legislasi, agar kepercayaan generasi muda terhadap lembaga politik dapat dipulihkan.

## LANDASAN TEORI

### Teori Persepsi

Persepsi adalah proses individu untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi sensorik dengan tujuan memberikan makna terhadap lingkungan yang ada (Organizational Behavior, n.d.). Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek atau peristiwa yang sama, karena persepsi melibatkan interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, ekspektasi, dan latar belakang individu. Tiga dimensi utama yang membentuk bagaimana seseorang memandang objek adalah dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Dimensi kognitif berkaitan dengan cara seseorang memahami, berpikir, memiliki harapan, dan pengalaman dalam menerima informasi tentang objek tersebut. Dimensi afektif melibatkan perasaan dan emosi seseorang yang memengaruhi bagaimana mereka menilai objek itu, baik positif



maupun negatif. Dimensi konatif menunjukkan tindakan, sikap, dan perilaku nyata yang dilakukan seseorang sebagai respons terhadap cara mereka memandang objek tersebut, yang menunjukkan hubungan antara pikiran internal dan tindakan eksternal dalam konteks sosial.

Dalam penelitian ini, teori persepsi digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa FISIP Universitas Palangka Raya membentuk pandangan mereka terhadap DPR RI sebagai lembaga politik. Mahasiswa FISIP dianggap memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi karena mereka mempelajari teori sosial, administrasi publik, dan perilaku politik yang berkaitan langsung dengan fungsi DPR RI. Melalui kerangka teori persepsi, dapat dijelaskan bagaimana pengalaman, nilai akademik, dan paparan informasi mahasiswa memengaruhi cara mereka menilai integritas dan kinerja DPR RI. Secara akademik, teori ini relevan dengan ranah FISIP karena disiplin ini berfokus pada pemahaman perilaku sosial dan politik masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Persepsi mahasiswa FISIP terhadap DPR RI juga menjadi indikator bagaimana pengetahuan sosial-politik diterapkan dalam menilai legitimasi lembaga legislatif.

Beberapa studi empiris, *When Politics Affects the Self: High Political Influence Perception Predicts Civic and Political Participation* (Michalski et al., 2023) menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap kinerja/demokrasi/lembaga politik berhubungan dengan motivasi dan keterlibatan politik mereka. Dengan demikian teori persepsi memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana mahasiswa menilai lembaga politik seperti DPR RI dan bagaimana penilaian tersebut memengaruhi niat serta tindakan partisipatif

### Trust Theory (Kepercayaan)

Teori kepercayaan (Trust Theory) merupakan salah satu teori penting dalam kajian perilaku organisasi yang dikembangkan secara komprehensif (Mayer et al., 1995) melalui model integratif kepercayaan organisasi (*An Integrative Model of Organizational Trust*). Teori ini menjelaskan bagaimana kepercayaan terbentuk, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta konsekuensi perilaku yang ditimbulkannya dalam hubungan interpersonal dan konteks organisasi. Menurut Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak tersebut akan bertindak sesuai dengan hal-hal yang penting bagi dirinya, walaupun tidak dapat dipantau atau dikendalikan secara langsung. Kepercayaan ini terbentuk melalui tiga dimensi utama, yaitu kemampuan (*ability*), kebajikan (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Kemampuan mencakup keterampilan, kompetensi, dan karakteristik yang memungkinkan seseorang memengaruhi bidang tertentu, seperti seorang pemimpin yang dianggap mampu karena keahlian teknis dan manajerialnya yang meyakinkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Kebajikan menggambarkan niat baik tanpa motivasi kepentingan pribadi, di mana individu akan lebih percaya pada pihak yang menunjukkan perhatian, empati, dan keinginan tulus membantu perkembangan mereka. Sementara itu, integritas berhubungan dengan persepsi bahwa pihak lain memegang teguh prinsip moral dan etika yang dapat diterima, dengan konsistensi antara perkataan dan tindakan sebagai indikator utama, sehingga membangun dasar yang kuat bagi terbentuknya kepercayaan.

Mahasiswa FISIP memiliki hubungan yang erat dengan teori kepercayaan politik karena secara akademik mereka mempelajari prinsip-prinsip *good governance*, transparansi, serta akuntabilitas lembaga publik. Melalui perspektif ini, mahasiswa tidak hanya menilai kinerja formal lembaga politik seperti DPR RI, tetapi juga aspek etika dan moralitas politik yang melekat pada perilaku dan integritas para anggotanya. Teori kepercayaan digunakan karena mampu menjelaskan mengapa tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI dapat menurun, meskipun mereka memahami fungsi dan peran lembaga tersebut secara normatif.

Sejumlah penelitian mendukung penggunaan teori ini. Tingkat kepercayaan politik generasi muda terhadap lembaga negara dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memandang lembaga tersebut adil, transparan, dan berintegritas (Michalski et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan (Martí et al., 2024) yang menjelaskan bahwa legitimasi dan moralitas institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Dengan demikian, kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI dapat dipahami sebagai hasil dari proses penilaian terhadap kualitas moral dan etika lembaga, bukan semata-mata dari kinerjanya secara administratif atau fungsional.

### Hubungan Teori Dengan Pembahasan

Teori kepercayaan dan teori persepsi sosial saling berhubungan erat dalam interaksi sosial dan bagaimana seseorang membentuk pandangannya terhadap orang lain atau lembaga. Persepsi sosial adalah cara individu memahami, menganalisis, dan menilai orang lain berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan sosial mereka. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan, kesopanan, dan niat baik dari pihak yang dilihat.

Sementara itu, teori kepercayaan mencakup keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan harapan dan tidak merugikan. Kepercayaan ini dibangun berdasarkan tiga elemen utama:

kemampuan, integritas, dan kebajikan. Dengan demikian, kepercayaan (*trust*) muncul ketika individu memiliki persepsi sosial yang positif terhadap pihak lain, yang dianggap memiliki kemampuan yang memadai, integritas yang baik, dan niat yang tulus. Persepsi sosial memberikan dasar bagi terbentuknya kepercayaan, karena individu atau kelompok hanya akan mempercayai pihak lain yang mereka anggap memiliki kualitas yang baik, seperti kompetensi dan niat baik. Sebaliknya, jika persepsi sosial terhadap pihak lain negatif, maka kepercayaan juga tidak akan terbangun, yang bisa menghambat interaksi sosial yang positif.

Persepsi mahasiswa terhadap DPR RI memengaruhi tingkat kepercayaan mereka pada lembaga tersebut. Karena itu, penting memahami bagaimana persepsi itu terbentuk serta faktor-faktor yang memengaruhinya, agar bisa menjelaskan mengapa kepercayaan publik terhadap DPR RI semakin menurun. Persepsi sosial yang positif dari mahasiswa menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan dalam hubungan sosial, sedangkan kurangnya persepsi sosial yang jelas bisa menghalangi terbentuknya kepercayaan dan mengganggu interaksi sosial.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017) merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis, logis, dan objektif sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan yang benar. Metode ini memiliki tahapan yang teratur agar proses pengumpulan data berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan penilaian mahasiswa terhadap kinerja DPR RI secara objektif dan terstruktur tanpa memengaruhi variabel yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan potret apa adanya mengenai persepsi mahasiswa, tanpa menelaah hubungan sebab-akibat antarvariabel.

Metode survei digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data karena efektif menjangkau banyak responden dalam waktu singkat. Survei juga memberi ruang bagi responden untuk menjawab secara mandiri dan anonim, sehingga potensi bias dapat ditekan dan kejujuran jawaban lebih terjamin. Populasi penelitian terdiri dari 150 mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya angkatan 2023. Fokus pada mahasiswa semester 5 didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah memperoleh dasar teori sosial, administrasi publik, dan politik serta memiliki tingkat keterlibatan organisasi yang lebih tinggi, sehingga dianggap representatif untuk menggambarkan persepsi generasi muda terhadap lembaga legislatif. Sampel sebanyak 108 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling agar hasil penelitian mencerminkan pandangan kelompok yang relevan dengan isu yang dikaji.

Instrumen penelitian berupa kuesioner berbasis teori persepsi sosial dan teori kepercayaan, menggunakan skala Likert empat poin untuk mengukur sikap serta persepsi mahasiswa terhadap DPR RI. Kuesioner disebar secara daring melalui Google Form untuk memudahkan pengisian dan meminimalkan bias. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata setiap indikator pada variabel persepsi dan kepercayaan. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pandangan mahasiswa terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga legislatif.

Pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, sementara data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber daring yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, mendukung proses analisis, dan memberi konteks yang lebih luas bagi temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

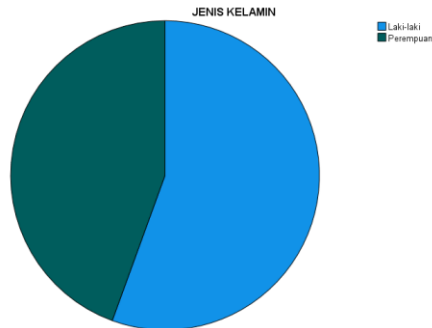
Penelitian ini melibatkan 108 responden dari mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2023 Universitas Palangka Raya. Meskipun target awal berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan adalah 118 responden dari populasi 150 mahasiswa, penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 108 responden yang representatif untuk dianalisis.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama sebagai landasan analisis. Pertama, Teori Persepsi dari Robbins & Judge yang mengukur bagaimana mahasiswa memahami dan menilai DPR RI melalui tiga dimensi: kognitif (pengetahuan dan pemahaman), afektif (perasaan dan emosi), dan konatif (kecenderungan bertindak). Kedua, Teori Kepercayaan (*Trust Theory*) dari Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) yang menganalisis tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI berdasarkan tiga



karakteristik: kemampuan (*ability*), integritas (*integrity*), dan kebajikan (*benevolence*). Kedua teori ini saling melengkapi dalam memahami krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI dari perspektif mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda yang kritis.

**Gambar 1**

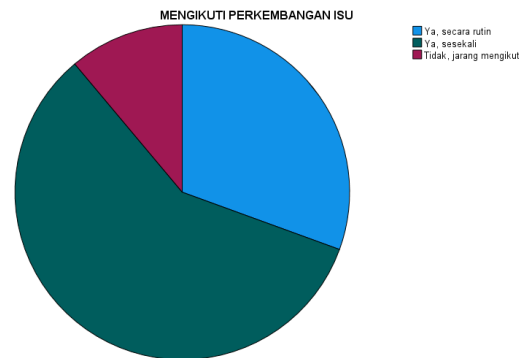


**Tabel 1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	60	55.6	55.6	55.6
	Perempuan	48	44.4	44.4	100.0
	Total	108	100.0	100.0	

Berdasarkan data yang terkumpul, dari total 108 responden terdapat 60 mahasiswa laki-laki (55,6%) dan 48 mahasiswa perempuan (44,4%). Komposisi ini menunjukkan bahwa responden laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan. Perbedaan ini tidak terlalu signifikan, sehingga hasil penelitian tetap mewakili persepsi kedua kelompok gender secara proporsional.

**Gambar 2**

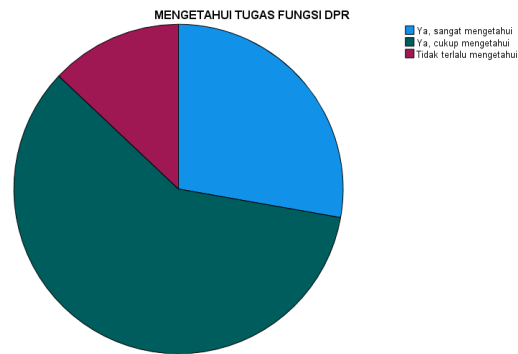


**Tabel 2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, secara rutin	33	30.6	30.6	30.6
	Ya, sesekali	63	58.3	58.3	88.9
	Tidak, jarang mengikuti	12	11.1	11.1	100.0
	Total	108	100.0	100.0	

Berdasarkan data yang terkumpul, 58,3% mahasiswa sesekali mengikuti isu politik, 30,6% mengikuti secara rutin, dan 11,1% jarang mengikuti. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kesadaran politik cukup baik, meskipun belum seluruhnya aktif mengikuti isu nasional. Kondisi ini menggambarkan minat dan kepedulian mahasiswa FISIP terhadap isu politik dan lembaga legislatif seperti DPR RI.

Gambar 3



Tabel 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, sangat mengetahui	30	27.8	27.8	27.8
	Ya, cukup mengetahui	64	59.3	59.3	87.0
	Tidak terlalu mengetahui	14	13.0	13.0	100.0
	Total	108	100.0	100.0	

Berdasarkan data yang terkumpul, 59,3% mahasiswa cukup mengetahui, 27,8% sangat mengetahui, dan 13% tidak terlalu mengetahui tugas serta fungsi DPR RI. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa FISIP memiliki pemahaman politik yang cukup baik untuk menilai peran dan kinerja lembaga legislatif. Pengetahuan ini menjadi dasar pembentukan persepsi dan kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI.

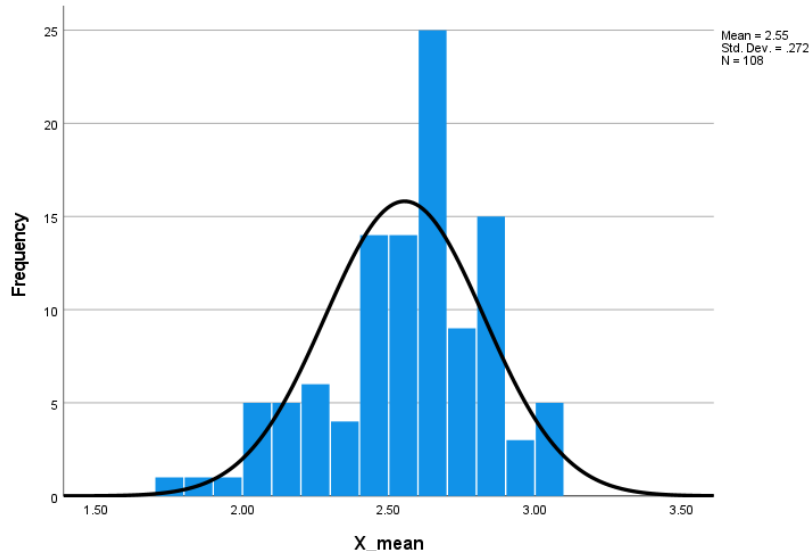
**Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap DPR RI (Variabel X)**

Analisis terhadap persepsi mahasiswa diukur melalui tiga dimensi utama berdasarkan Teori Persepsi Robbins & Judge, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Berdasarkan hasil pengolahan data dari 108 responden, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 4

Variabel X	Indikator	Indeks Mean Skor
X1	Kognitif	2.85
X2	Afektif	1.68
X3	Konatif	3.13

Gambar 5





**Kemampuan (2.59)**

Indikator kemampuan (2.59) menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI masih memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi dan pembuatan kebijakan publik, meskipun efektivitas pelaksanaannya dinilai belum maksimal.

1. Integritas (2.45)

Indikator integritas (2.45) tergolong rendah, yang mencerminkan adanya keraguan mahasiswa terhadap moralitas dan kejujuran anggota DPR RI. Berbagai kasus pelanggaran etik, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang yang sering diberitakan di media turut memperkuat persepsi negatif terhadap integritas lembaga ini.

2. Kebajikan (2.37)

Indikator kebajikan (2.37) memperoleh skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mahasiswa beranggapan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil DPR RI lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu dibandingkan kepentingan rakyat secara umum.

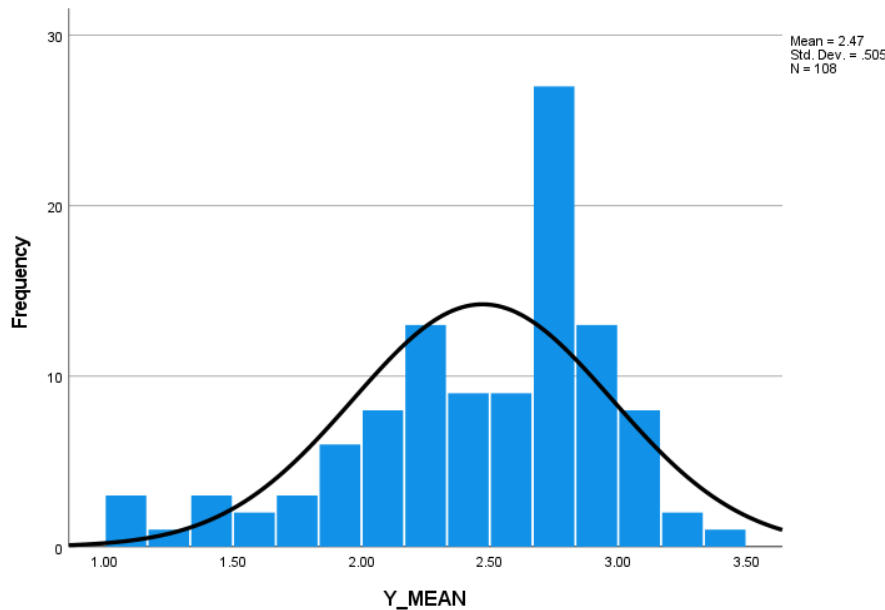
**Analisis Trust Issue Terhadap DPR RI (Variabel Y)**

Tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI diukur melalui tiga indikator berdasarkan Teori Kepercayaan dari Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yaitu kemampuan (*ability*), integritas (*integrity*), dan kebajikan (*benevolence*). Hasil analisis menunjukkan:

**Tabel 5**

Variabel Y	Indikator	Indeks Mean Skor
Y1	Kemampuan	2,59
Y2	Integritas	2,45
Y3	Kebajikan	2,37

**Gambar 5**



1. Kemampuan (2.59)

Indikator kemampuan (2.59) menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI masih memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi dan pembuatan kebijakan publik, meskipun efektivitas pelaksanaannya dinilai belum maksimal.

2. Integritas (2.45)

Indikator integritas (2.45) tergolong rendah, yang mencerminkan adanya keraguan mahasiswa terhadap moralitas dan kejujuran anggota DPR RI. Berbagai kasus pelanggaran etik, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang yang sering diberitakan di media turut memperkuat persepsi negatif terhadap integritas lembaga ini.

### 3. Kebajikan (2.37)

Indikator kebajikan (2.37) memperoleh skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mahasiswa beranggapan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil DPR RI lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu dibandingkan kepentingan rakyat secara umum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya terhadap DPR RI berada pada kategori cukup kritis namun cenderung negatif. Mahasiswa memahami peran DPR sebagai lembaga yang memegang fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran negara, tetapi mereka menilai kinerja lembaga tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Hal ini tercermin dari skor rata-rata dimensi persepsi (X) yang menunjukkan pemahaman yang baik secara kognitif, namun rendah dalam aspek emosional (afektif). Sementara dari sisi kepercayaan (Y), ketiga indikator trust kemampuan, integritas, dan Kebajikan menunjukkan nilai sedang hingga rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun mahasiswa masih mengakui peran formal dan kapasitas kelembagaan DPR RI, tingkat kepercayaan terhadap moralitas dan orientasi lembaga tersebut masih lemah.

Dalam konteks teori persepsi Robbins & Judge dan teori kepercayaan Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI secara rasional dan objektif, bukan berdasarkan simpati emosional. Mereka tahu peran DPR sangat penting bagi sistem demokrasi, tetapi sulit mempercayai lembaga yang dinilai sering kali tidak transparan, kurang etis, dan belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, meskipun skeptis, mahasiswa tetap menunjukkan kepedulian dan kemauan untuk berpartisipasi secara kritis dalam mengawasi lembaga legislatif. Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap DPR RI secara umum dapat dikategorikan sebagai kritis, sadar politik, dan reflektif, yaitu memahami pentingnya peran DPR tetapi sekaligus menuntut perubahan nyata agar lembaga ini kembali layak dipercaya publik.

Dimensi kognitif menggambarkan sejauh mana mahasiswa memahami dan menilai fungsi serta peran DPR RI secara rasional. Nilai 2,85 menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan politik yang cukup baik mereka paham DPR berperan sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, dan pengelola anggaran negara. Namun, pemahaman itu tidak otomatis menumbuhkan kepercayaan. Ini sejalan dengan teori persepsi Robbins & Judge yang menjelaskan bahwa persepsi kognitif bersifat interpretatif; seseorang dapat memahami suatu objek dengan baik, tetapi tetap menilainya secara kritis jika informasi yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi.

Meningkatnya literasi politik generasi muda tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga politik, karena adanya kesenjangan antara idealisme dan praktik (Schulz, 2024). Temuan serupa oleh (Martí et al., 2024) menegaskan bahwa legitimasi dan moralitas lembaga publik menjadi faktor kunci dalam membentuk kepercayaan politik. Artinya, rendahnya kepercayaan terhadap DPR RI bukan disebabkan kurangnya pemahaman, melainkan karena mahasiswa memahami fungsinya dengan baik dan menemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik.

Dimensi afektif merupakan aspek emosional dalam persepsi mahasiswa terhadap DPR RI. Skor yang sangat rendah (1,68) menunjukkan adanya ketidakpuasan dan kekecewaan yang cukup mendalam. Dimensi afektif terbentuk dari reaksi emosional terhadap pengalaman sosial. Bila objek dipersepsikan negatif, maka emosi yang muncul berupa rasa tidak suka, sinis, atau marah (Stylos et al., n.d.).

Mahasiswa menilai DPR RI sering kali terlibat dalam polemik publik seperti korupsi, pelanggaran etik, dan keputusan politik yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Faktor-faktor ini memunculkan persepsi emosional yang negatif. (Iqbal & Pudjiastuti, 2011) juga menemukan bahwa krisis afeksi publik terhadap DPR dipicu oleh rasa frustrasi terhadap perilaku politik elit yang tidak mencerminkan moral publik. Rendahnya dimensi afektif mencerminkan hilangnya *emotional trust* antara DPR dan masyarakat. Artinya, publik bukan hanya tidak percaya pada kemampuan DPR, tetapi juga tidak "menyukai" lembaga tersebut. Kondisi ini berbahaya karena sulit membangun legitimasi politik tanpa adanya ikatan emosional dengan rakyat. DPR perlu melakukan *rebranding moral* dengan menegakkan etika politik, menindak pelanggaran secara terbuka, dan menampilkan empati sosial terhadap isu publik. Restorasi kepercayaan emosional tidak bisa dicapai lewat pencitraan semata, melainkan melalui tindakan nyata yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Dimensi konatif menunjukkan kecenderungan mahasiswa untuk bertindak atau merespons isu-isu politik yang berkaitan dengan DPR RI. Skor tertinggi 3,13 menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki persepsi negatif terhadap DPR, mereka tidak apatis. Mereka justru memiliki semangat partisipatif yang kuat, baik dalam berdiskusi, mengkritik, maupun terlibat dalam aktivitas sosial-politik. Dalam kerangka Robbins & Judge, dimensi konatif merupakan wujud perilaku dari hasil proses persepsi. Mahasiswa yang memahami realitas politik (kognitif) dan kecewa terhadapnya (afektif) akan terdorong untuk beraksi melalui cara-cara yang konstruktif. Hasil ini konsisten dengan temuan Temuan penelitian ini



sejalan dengan (Wahyuningroem et al., 2023) yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap sistem politik dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga formal justru menjadi pemicu partisipasi kritis generasi muda, terutama mahasiswa, dalam memperjuangkan perbaikan demokrasi melalui gerakan sosial dan aktivisme digital. Tingginya skor konatif adalah sinyal bahwa mahasiswa masih peduli terhadap sistem politik dan berperan sebagai *agent of control*. DPR dapat memanfaatkan hal ini dengan memperkuat hubungan dengan kelompok mahasiswa dan akademisi melalui forum dialog kebijakan, kunjungan parlemen, dan pelibatan publik dalam penyusunan RUU. Jika tidak ditanggapi, semangat kritis mahasiswa dapat berubah menjadi resistensi sosial yang memperburuk citra DPR.

Setelah membahas bagaimana mahasiswa melihat DPR RI dari tiga aspek utama yaitu kognitif, afektif, dan konatif, bagian ini fokus pada tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, khususnya DPR RI, menjadi hal penting dalam menjaga keabsahan demokrasi dan keberhasilan representasi politik. Menurut Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) dalam model terintegrasi tentang kepercayaan organisasional, kepercayaan terbentuk melalui tiga faktor utama, yaitu kemampuan, integritas, dan kebajikan. Ketiga faktor ini mencerminkan sisi rasional dan moral yang menentukan seberapa besar masyarakat percaya terhadap suatu lembaga. Kemampuan menunjukkan sejauh mana lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsi secara profesional; integritas menggambarkan konsistensi moral dan kejujuran lembaga dalam menjalankan tugas yang diberikan masyarakat; sedangkan kebajikan menunjukkan niat baik dan sikap peduli lembaga terhadap kepentingan masyarakat. Analisis terhadap ketiga faktor ini penting untuk memahami sebab-sebab spesifik yang menyebabkan munculnya masalah kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI. Dengan demikian, bagian berikut akan menjelaskan secara rinci bagaimana mahasiswa menilai DPR RI dari segi kemampuan, integritas, dan kebajikan, serta bagaimana ketiga aspek tersebut saling memengaruhi dalam membentuk tingkat kepercayaan secara keseluruhan.

Indikator kemampuan menggambarkan sejauh mana mahasiswa menilai DPR RI memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran. Skor 2,59 menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengakui kemampuan struktural DPR RI, namun menilai bahwa efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya belum optimal. Dalam kerangka teori Mayer, kemampuan mencerminkan aspek profesionalitas dan kompetensi lembaga yang dipercaya. Artinya, kepercayaan akan meningkat bila publik melihat bahwa lembaga tersebut mampu menjalankan perannya secara efektif dan akuntabel. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mahasiswa menilai kemampuan DPR RI secara "moderat" mereka mengakui peran formalnya, tetapi menilai output kebijakan yang dihasilkan belum mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Temuan ini sejalan dengan (Zacky et al., 2024) yang menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang DPR RI memiliki fungsi strategis, namun banyak kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada publik. DPR perlu meningkatkan efektivitas fungsi legislasi dengan memperkuat riset kebijakan, memperluas partisipasi publik dalam pembahasan RUU, dan memastikan hasil kerja nyata bisa dirasakan masyarakat. Bila kinerja substantif meningkat, kepercayaan terhadap kemampuan DPR akan ikut naik, yang menjadi fondasi awal pemulihan citra lembaga.

Integritas adalah aspek paling krusial dalam teori trust, karena mencerminkan moralitas, kejujuran, dan konsistensi nilai antara ucapan dan tindakan. Skor 2,45 menunjukkan bahwa mahasiswa menilai integritas DPR RI rendah. Hal ini berarti ada krisis moral dan kejujuran yang menyebabkan publik sulit percaya pada lembaga ini, meskipun mereka memahami fungsinya secara struktural. Kasus korupsi, pelanggaran etik, konflik kepentingan, dan gaya hidup hedonis anggota DPR menjadi faktor utama yang memperkuat persepsi negatif ini. Dalam teori Mayer et al., lemahnya integritas akan langsung menurunkan trust, bahkan jika kemampuan lembaga cukup baik. Temuan ini sejalan dengan bukti empiris sebelumnya yang menunjukkan bahwa integritas pejabat publik merupakan salah satu determinan utama pembentukan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan (*OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions - 2024 Results*, 2024). Rendahnya skor integritas menjadi alarm serius bagi DPR. Masalah ini bukan hanya soal persepsi, tetapi legitimasi. Rendahnya integritas anggota DPR membuat publik melihat lembaga ini bukan sebagai wakil rakyat, tetapi kelompok kepentingan. DPR perlu memperkuat kode etik, memperketat sanksi terhadap pelanggaran moral, dan membuka proses etik secara transparan ke publik. Tanpa pemulihan integritas, setiap upaya perbaikan kinerja hanya akan dianggap pencitraan.

Kebajikan atau *benevolence* menggambarkan niat baik dan orientasi lembaga terhadap kepentingan rakyat. Skor 2,37 merupakan yang paling rendah di antara ketiga indikator, menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI belum benar-benar berpihak kepada masyarakat. Mereka melihat keputusan DPR lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kelompok elit dibandingkan kepentingan publik. Kebajikan adalah aspek yang membuat publik yakin bahwa lembaga yang dipercaya tidak hanya kompeten dan jujur, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat (Mayer et al., 1995). Jika lembaga dianggap tidak memiliki empati sosial atau tidak memahami aspirasi

rakyat, *trust* akan runtuh meskipun lembaga itu bekerja secara teknis dengan baik. Penelitian dari Jurnal Pascasarjana UNLA (2025) menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap kebijakan DPR seperti Revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja muncul karena publik menilai DPR tidak sensitif terhadap aspirasi rakyat.

Analisis dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2025) juga mengungkap bahwa isu kesejahteraan anggota DPR yang berlebihan di tengah krisis ekonomi publik memperburuk persepsi bahwa DPR tidak memiliki empati politik. Kebajikan adalah indikator paling strategis untuk memulihkan kepercayaan publik. Skor rendah ini menunjukkan DPR harus memperbaiki orientasi politiknya: berpihak pada isu-isu kesejahteraan rakyat, mendengarkan aspirasi publik sebelum mengambil keputusan, dan menampilkan empati dalam setiap kebijakan. Bila DPR gagal menunjukkan niat baik, maka kepercayaan publik akan terus tergerus, meskipun kemampuan dan integritasnya kelak membaik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya terhadap DPR RI cenderung kritis namun bernuansa negatif. Secara umum, mahasiswa memahami peran DPR RI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi menilai pelaksanaannya belum mencerminkan kepentingan publik secara optimal.

Hasil analisis berdasarkan teori persepsi Robbins & Judge memperlihatkan bahwa dimensi kognitif memperoleh skor cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman rasional terhadap fungsi DPR RI. Namun, dimensi afektif berada pada kategori rendah, mencerminkan adanya kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap perilaku politik anggota DPR. Sementara itu, dimensi konatif menunjukkan skor tertinggi, menandakan bahwa meskipun mahasiswa bersikap kritis, mereka tetap memiliki kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan menanggapi isu politik secara konstruktif.

Berdasarkan teori kepercayaan Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI juga berada pada kategori sedang hingga rendah. Indikator kemampuan (*ability*) dinilai cukup baik, namun integritas (*integrity*) dan kebajikan (*benevolence*) memperoleh skor rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih meragukan moralitas dan orientasi DPR RI terhadap kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI juga tercermin di kalangan mahasiswa, kelompok yang seharusnya memiliki kesadaran politik tinggi. Persepsi yang terbentuk lebih banyak dipengaruhi oleh citra negatif lembaga dan perilaku anggotanya daripada oleh fungsi kelembagaan itu sendiri. Oleh karena itu, DPR RI perlu melakukan upaya pemulihan kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi, penguatan integritas, serta menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan rakyat. Selain itu, peningkatan komunikasi publik dan pelibatan generasi muda dalam proses legislasi dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki citra lembaga dan memperkuat legitimasi politik di masa mendatang.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut. DPR RI perlu melakukan langkah konkret dalam memulihkan kepercayaan publik melalui peningkatan integritas, transparansi, serta konsistensi dalam menegakkan etika politik. Lembaga ini juga sebaiknya lebih terbuka dalam proses legislasi dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa agar tercipta hubungan yang partisipatif serta meningkatkan legitimasi publik terhadap kinerja parlemen. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penting untuk terus meningkatkan literasi politik dan mempertahankan sikap kritis terhadap isu-isu politik secara konstruktif melalui kegiatan akademik maupun diskusi publik.

Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian ke universitas lain atau kelompok masyarakat yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi publik terhadap DPR RI. Penelitian kualitatif juga dapat menjadi alternatif untuk menggali lebih dalam faktor-faktor emosional dan moral yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.



**DAFTAR PUSTAKA**

- 3528-Article Text-15587-1-10-20230621. (n.d.).
- Adinugroho, I. (2021). Understanding the Psychological Perspective of Political Trust in Indonesia Context. *Buletin Psikologi*, 29(2), 161. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.57311>
- Baron, R. &, & Byrne, D. V. (2002). *Psikologi Sosial Jilid 2. Edisi Kesepuluh*. In Jakarta: Erlangga.
- Devine, D., Valgarðsson, V., Jennings, W., Stoker, G., & Bunting, H. (2025). The causes of perceived government trustworthiness. *European Journal of Political Research*, 64(3), 1394–1412. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12742>
- Fadilah, Q. E., & Ofi Hidayat, ) ; (n.d.). Persepsi Masyarakat Kelurahan Seketeng Terhadap Tugas Humas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dalam Penyebaran Informasi Pemerintahan Melalui Media Sosial. In *Jurnal Professional* (Vol. 10, Issue 1).
- Fisher, J., & Hamilton, C. H. (1996). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. In *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* (Vol. 25, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/0899764096251009>
- Hadiwasito, W. (2024). Democratic Consolidation An Indonesian Unity Perspective. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(1). <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i1.565>
- Haetami Heru, S. Y. A. S. W. (2023, July 6). Kepercayaan Publik Rendah terhadap DPR, Produk Legislasi Disorot. [https://kbr.id/articles/Indeks/Kepercayaan-Publik-Rendah-Terhadap-Dpr-Produk-Legislati-Disorot?utm\\_source=chatgpt.com#google\\_vignette](https://kbr.id/articles/Indeks/Kepercayaan-Publik-Rendah-Terhadap-Dpr-Produk-Legislati-Disorot?utm_source=chatgpt.com#google_vignette).
- HALAMAN JUDUL. (n.d.).
- Harbowo Nikolaus. (2025, January 29). Kepercayaan Publik Rendah, DPR Diminta Berbenah. [https://www.kompas.id/artikel/Kepercayaan-Publik-Rendah-Dpr-Diminta-Berbenah?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.id/artikel/Kepercayaan-Publik-Rendah-Dpr-Diminta-Berbenah?utm_source=chatgpt.com).
- Hidayaturrahman, M., Purwanto, E., Sinaga, A., Ubaid, A., Wardhani, W., & Sugiantiningsih, A. (2024). Public expectations towards the roles of the Indonesian house of representatives. *Jurnal Studi Komunikasi* (Indonesian Journal of Communications Studies), 8(1), 183–194. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.7432>
- Iqbal, M. A., & Pudjiastuti, W. (2011). KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DPR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA. In *Kepercayaan Publik Terhadap DPR Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Forum Ilmiah* (Vol. 8, Issue 2).
- Judijanto, L., Mulyapradana, A., & Hidayati, U. (n.d.). Analysis of the Effect of Public Administration Transparency on Public Trust in Indonesia ARTICLE HISTORY. *Sciences Du Nord Humanities and Social Sciences*, 1(02), 69–76. <https://doi.org/10.58812/e2d9ey90>
- Kadir, A., Husen Zuada, L., & Wisetsri, W. (n.d.). The Influence of Legislative Performance and Public Trust on Constituent Loyalty (Study on the 2019 Legislative Election in the Electoral District of Southeast Sulawesi Province).
- Kwon, J., & Vogt, C. (n.d.). idENTifyiNG ThE EFFECTS of CoGNiTivE, affECTivE, aNd BEHavioRaL ComPoNENTS oN RESidENTS' aTTiTudES ToWaRd PLaCE maRkETiNG.
- Layuk, R. E. (2019). Hubungan Antartrustworthiness dengan Trust in Coworker Di Pt. X. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1).
- Martí, J., Cueto, R. M., & Espinosa, A. (2024). Legitimacy, institutional trust, and political moral laxity: psychopolitical impact of the governance of the legacy of 'Lima 2019' games. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1412477>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & David Schoorman, F. (1995a). An Integrative Model of Organizational Trust (Vol. 20, Issue 3). <https://www.jstor.org/stable/258792?seq=1&cid=pdf->
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & David Schoorman, F. (1995b). An Integrative Model of Organizational Trust (Vol. 20, Issue 3). <https://www.jstor.org/stable/258792?seq=1&cid=pdf->
- Meilinda, S. D., & Suwandi, -. (2024). Persepsi Masyarakat Mengenai Nilai-Nilai Integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam Layanan ASN di Kabupaten Buton. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i1.4299>
- Michalski, P., Marchlewska, M., Szczepańska, D., Rogoza, M., & Molenda, Z. (2023). When Politics Affects the Self: High Political Influence Perception Predicts Civic and Political Participation. *Journal of Social and Political Psychology*, 11(2), 516–533. <https://doi.org/10.5964/jspp.8379>
- NOTE\_ON\_THE\_CONCEPT\_OF\_SUSTAINABLE\_DEVEL. (n.d.).
- OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions - 2024 Results. (2024). OECD Publishing.
- Organizational Behavior. (n.d.).
- Patmisari, P., Haryani, F. R., Ariani, S., & Nur Isnaini, D. R. (2024). Democracy satisfaction and political engagement: understanding student interest in political involvement. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(1), 475–486. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i1.52630>

- prasetya1. (2021, December 5). Students Activism and Political Participation in the Post-Reformation. [https://Prasetya.Ub.Ac.Id/En/Aktivisme-Dan-Partisipasi-Politik-Mahasiswa-Pasca-Reformasi/?Utm\\_source=chatgpt.Com](https://Prasetya.Ub.Ac.Id/En/Aktivisme-Dan-Partisipasi-Politik-Mahasiswa-Pasca-Reformasi/?Utm_source=chatgpt.Com).
- Putnam, R. D. ., Leonardi, Robert., & Nanetti, R. Y. . (1994). *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press, California Princeton Fulfillment Services [distributor].
- Raharjo Bowo Dwi, I. H. D. (2023, June 26). Survei Populi: Publik Tak Percaya DPR RI hingga Partai Politik. [https://Www.Suara.Com/News/2023/06/26/182129/Survei-Populi-Publik-Tak-Percaya-Dpr-Ri-Hingga-Partai-Politik?Utm\\_source=chatgpt.Com](https://Www.Suara.Com/News/2023/06/26/182129/Survei-Populi-Publik-Tak-Percaya-Dpr-Ri-Hingga-Partai-Politik?Utm_source=chatgpt.Com).
- Rasaili, W. (2015). KINERJA DPR DAN KEPERCAYAAN PUBLIK: Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019. *Public Corner*, 10(2).
- Report of the World Commission on Environment and Development. (n.d.).
- RILIS MEDIA (SENIN, 26 JUNI 2023). (n.d.).
- RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024. (n.d.).
- Ritonga Wahyudi Machradin, H. N. (2025, February 9). Revisi Tatib DPR Bisa Gerus Kepercayaan Publik, Prabowo Diminta Bertindak. [https://Www.Kompas.Id/Artikel/Revisi-Tatib-Dpr-Turunkan-Kepercayaan-Publik-Pada-Negara-Presiden-Diminta-Bertindak?Utm\\_source=chatgpt.Com](https://Www.Kompas.Id/Artikel/Revisi-Tatib-Dpr-Turunkan-Kepercayaan-Publik-Pada-Negara-Presiden-Diminta-Bertindak?Utm_source=chatgpt.Com).
- Rizaldi Ahmad Bagas. (2025, January 29). Formappi: Publik tunggu perubahan DPR jika ingin kepercayaan naik. [https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/4613766/Formappi-Publik-Tunggu-Perubahan-Dpr-Jika-Ingin-Kepercayaan-Naik?Utm\\_source=chatgpt.Com](https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/4613766/Formappi-Publik-Tunggu-Perubahan-Dpr-Jika-Ingin-Kepercayaan-Naik?Utm_source=chatgpt.Com).
- Robbins, S. P. & T. A. Judge. (2016). Perilaku Organisasi Edisi ke-12, Jakarta: Salemba Empat. *Journal of Business and Management Sciences.*, 4.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku organisasi Organizational behavior* (16th edition). Jakarta: McGraw Hill Dan Salemba Empat, 16th Editi.
- Rotter, J. B. (1967). A new scale for the measurement of interpersonal trust. *Journal of Personality*, 35(4). <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1967.tb01454.x>
- Saputra, M. R., & Korespondensi, P. (2025). Public Ethics and the Legitimacy of Indonesian Democracy: Protests over DPR Allowances, Elite Conflict, and Civil Response Etika Publik dan Legitimasi Demokrasi Indonesia: Protes Tunjangan DPR, Konflik Elite, dan Respons Sipil. In *Journal of State Democracy (JSD)* (Vol. 1, Issue 1).
- Schulz, W. (2024). Young people's trust in institutions, civic knowledge and their dispositions toward civic engagement. *Large-Scale Assessments in Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40536-024-00210-1>
- Siahay, A. Z. D. (n.d.). *Building Public Trust through Transparency and Accountability: A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting*.
- Stylos, N., Ding, K., & Yao, Y. (n.d.). Cognitive image, affective image, cultural dimensions, and conative image: A new conceptual framework.
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2023). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 543. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.1>
- Yani, A. (n.d.). DO MILLENNIALS TRUST IN POLITICAL INSTITUTIONS? A STUDY OF INDONESIA YOUTH POLITICAL TRUST.
- Yetry Jelly, G., & Prihana, E. (2025). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Peran dan Tantangan DPR-RI dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. In *Pascasarjana, Universitas Langlangbuana* (Vol. 1, Issue 2). <http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/imperium/index>
- Zacky, T., Pendidikan, M., Fakultas, I., Tarbiyah, I., Keguruan, D., Negeri, I., Malik, M., & Malang, I. (2024). Ulul Amri: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam MANAJEMEN HUMAS INSTANSI NEGARA DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK (Vol. 3, Issue 1). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/uajmpi>